

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kemajuan Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang didukung dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah di pasar modal. Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan pasar modal yaitu efisiensi dalam penyampaian informasi yang dapat diakses oleh investor melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang diumumkan perusahaan merupakan salah satu informasi yang dipandang sangat penting bagi investor, karena dengan melihat laporan keuangan menjadi indikator utama untuk memperkirakan dengan lebih tepat dan rasional mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Perusahaan adalah bentuk usaha badan dimana sumber daya (input) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) kepada pelanggan untuk memperoleh keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang diminati oleh para investor, alasannya karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia. Industri makanan dan minuman adalah industri yang perkembangannya baik, pertumbuhan yang positif, sangat cepat dan akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.

Pajak merupakan iuran yang dilakukan untuk pribadi perorangan atau badan yang dilakukan oleh negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai kepentingan publik, diantaranya adalah peningkatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta untuk pembangunan di daerah.

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak mengingat sangat vitalnya kegunaan pajak bagi negara. Namun dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi, sedangkan wajib pajak berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak karena pajak dianggap sebagai pengurang pendapatan (Pradasari dan Ermawati, 2018).

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yang pertama yaitu *corporate governance*, *corporate governance (CG)* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. *Corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pimpinan perusahaan. Dalam *corporate governance* ada dua indikator yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen dan komite audit.

Aspek *corporate governance* yang pertama adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang independen sebagai pengawas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudea (2018) serta Mulyani dkk (2018) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018) serta Marfirah dan BZ (2016) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Aspek *corporate governance* yang kedua dengan menggunakan indikator komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, diantaranya yaitu membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat

profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) serta Asri dan Suardana (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradasari dan Ermawati (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) serta Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang ketiga yaitu *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang-utangnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) serta Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) serta Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang keempat yaitu beban iklan. Beban iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk memasarkan produknya, dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan volume penjualan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Solikin (2017), Rozi (2017) menyatakan bahwa beban iklan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang terakhir yaitu karakter eksekutif, dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taking* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taking* merupakan eksekutif yang berani mengambil risiko. Sedangkan eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil risiko. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tunjungsari (2018) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Adapun fenomena mengenai *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan makanan dan minuman PT Coca Cola Indonesia. Dalam kasus ini pada tahun 2014, PT Coca Cola Indonesia telah melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menemukan terdapat pembengkakan biaya yang cukup besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajak PT CCI mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari

pembiayaan iklan minuman merk coca cola sebesar Rp 566,84 miliar sehingga mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI penghasilan kena pajak mereka berjumlah Rp 554,24 miliar. Berdasarkan selisih tersebut Direktorat Jenderal Pajak menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI adalah sebesar 49,24 miliar. Beban biaya yang sangat besar membuat Direktorat Jenderal Pajak mengarahkan PT CCI melakukan praktik *tax avoidance* (Kontan.co.id).

Berdasarkan uraian masalah fenomena diatas, penelitian mengenai praktik *tax avoidance* di Indonesia, disebabkan oleh perusahaan yang memanfaatkan beban iklan yang tinggi untuk menekan biaya pajak yang akan disetorkan oleh perusahaan, dimana cara ini tidak melanggar hukum perpajakan namun dapat merugikan Negara.

Jumlah perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari persentase praktik *tax avoidance* di perusahaan yang dihitung dari pengukuran *tax avoidance*. Model estimasi pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan model *cash effective tax rate* (CETR). *Tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR), yaitu pembagian antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Yudea, 2018). Semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 20% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR yaitu dibawah tarif pajak penghasilan badan sebesar 20% mengindikasikan bahwa semakin

tinggi tingkat *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Persentase praktik *tax avoidance* perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 diperoleh berdasarkan perhitungan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) dengan kriteria jumlah perusahaan dengan persentase CETR yang dibawah 20% dibagi dengan total perusahaan pada tahun yang bersangkutan dan dikalikan 100% yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Persentase Praktik *Tax Avoidance* Perusahaan Makanan dan Minuman**  
**Periode 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
2014	16,67%
2015	30,77%
2016	23,08%
2017	6,25%
2018	29,41%

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan perhitungan CETR maka persentase praktik *tax avoidance* perusahaan makanan dan minuman periode 2014-2018 menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2015 sebesar 14,1%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016, 2017 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih banyak dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman di Indonesia karena mulai tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan yaitu mencapai 29,41%. Alasan perusahaan makanan dan minuman melakukan *tax avoidance* adalah untuk

menghindari beban pajak yang tinggi karena beban pajak dianggap perusahaan sebagai pengurang pendapatan atau laba perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang mengacu pada penelitian (Yudea, 2018). Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yudea, 2018). Perbedaan yang pertama dalam penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu beban iklan dan karakter eksekutif. Variabel beban iklan dipilih karena merupakan salah satu indikator yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban iklan yang tinggi untuk menekan biaya pajak yang akan disetorkan, dimana cara ini tidak melanggar hukum perpajakan, tetapi sangat merugikan Negara.

Selanjutnya yaitu variabel karakter eksekutif dipilih karena karakter seorang pimpinan mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam *tax avoidance*. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taking* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taking* merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnisnya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taking* atau *risk averse*. Hasil penelitian menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (Oktamawati, 2017).



Perbedaan yang kedua yaitu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Yudea (2018) menggunakan objek penelitian perusahaan *automotive*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, penelitian Yudea (2018) menggunakan periode 2013–2017, sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan yaitu periode 2014-2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Beban Iklan, dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Mengingat keterbatasan waktu penelitian, perlu adanya batasan permasalahan untuk mempermudah penelitian ini agar lebih terarah, lebih fokus dan dapat meminimalisir kesalahan penafsiran. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya:
  - a. Variabel Dependen adalah *Tax Avoidance*.
  - b. Variabel Independen adalah *Corporate Governance* yang diindikasikan dengan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit, selanjutnya

Variabel Independen Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Beban Iklan dan Karakter Eksekutif.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang muncul sehingga peneliti mempunyai arah tujuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian dan digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya, masalah yang teridentifikasi dari latar belakang adalah:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban iklan terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi institusi pendidikan, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi, hasil yang diperoleh juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* pada perusahaan.
2. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai syarat gelar SE dan berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan.
3. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan mengenai *tax avoidance* atau penghindaran pajak, sehingga lebih efektif dalam menanggapi masalah pajak perusahaan makanan dan minuman di masa yang akan datang.